



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH**

KATA PENGANTAR

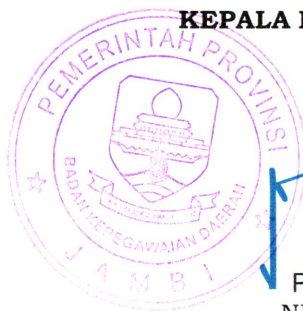
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini.

Dokumen Rancangan Renja Perubahan ini disusun untuk melakukan penyesuaian dalam upaya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja yang telah dilaksanakan, yaitu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Renja merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Rancangan Renja Perubahan ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi disusun sebagai komitmen bersama dalam proses optimalisasi capaian target kinerja pada tahun anggaran 2025 serta sebagai arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, 11 Agustus 2025



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

H. SULAIMAN, S.Ag
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197210012000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II	6
2.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja	6
2.1.2 Analisis Capaian Kinerja	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jambi	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi	26
BAB III	
3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025	29
3.1.1 Program yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025	36
3.1.2 Kegiatan yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025	36
3.1.3 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025	37
BAB IV	
Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Periode Pelaksanaan: s.d Triwulan II Tahun 2025	6
Tabel 2. 2	Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d Triwulan II	18
Tabel 2. 3	Kegiatan Operasional Program Kepegawaian Daerah	19
Tabel 2. 4	Capaian Kinerja Sasaran 2 s.d Triwulan II	20
Tabel 2. 5	Kegiatan Operasional Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3. 1	Rekapitulasi Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) merupakan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 2 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini menyatakan ruang lingkup tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Permendagri tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun beserta perubahannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari materi RENJA Tahun 2025, perbaikan dan penyempurnaan dilaksanakan untuk menyikapi dinamikan kinerja tahun berjalan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II. Meskipun dilakukan perubahan, namun Renja Perubahan ini tetap sejalan dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 serta Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya, penyusunan dokumen rancangan Renja Perubahan ini dimaknai sebagai upaya tindak lanjut dari penyesuaian alokasi anggaran untuk optimalisasi penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja tahun

2024, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - b. Mutasi dan Promosi ASN
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rancangan Perubahan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 39);
12. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi tentang capaian kinerja renja tahun tahun 2025, sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja tahun 2025.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini adalah untuk:

1. Optimalisasi tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
2. Optimalisasi terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) BKD Tahun 2025 agar selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA;
Sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jambi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi juga harus memerhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Untuk memastikan agar target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen renja terealisasi dengan baik dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan evaluasi dimaksud meliputi pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

2.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan renja diukur dengan cara membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hingga sampai dengan akhir triwulan I ini, evaluasi hasil pelaksanaan renja dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Periode Pelaksanaan: s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		14=6+12		15=14/5x100			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	BB Indeks	121.464.139.210,17	BB Indeks	53.691.151.532,00	BB Indeks	16.035.630.320,20	BB	2.994.136.493,00	BB	6.966.494.028,00	0	0	0	0	BB Indeks	9.961.105.389,00	BB	63.652.256.921,00	BB	52,40		
			Indeks Kepuasan pelayanan	93		89,39		85,3		86		86							86						
			Persentas tercapainya Nilai Sakip dan Indeks Kepuasan	100		100		100		100		100							100						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.550.000.000,00	100	658.865.143,00	85	234.396.100,00	17,71	44.529.245,00	47,22	44.529.245,00	0	0	0	0	64,93	89.058.490,00	78,89	747.923.633,00	78,89	48,25		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	125.000.000,00	18	127.974.331,00	6	188.920.980,00	1	30.320.705,00	3	30.320.705,00					4	60.641.410,00	14	188.615.741,00	140	150,89	Subbag Perencanaan	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1.250.000.000,00	4	447.152.978,00	3	19.347.120,00	1	7.383.040,00	2	7.383.040,00					3	14.766.080,00	3	461.919.058,00	50	36,95	Subbag Perencanaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	175.000.000,00	14	83.737.834,00	8	26.128.000,00	1	6.825.500,00	4	6.825.500,00					5	13.651.000,00	7	97.388.834,00	46,67	55,65	Subbag Perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						15,56	18,55	
Predikat Kinerja																								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	87.362.000.000,00	85	45.307.960.927,00	85	12.908.991.153,00	15,94	2.714.159.670,00	66,67	6.385.025.435,00	0	0	0	0	82,61	9.099.185.105,00	43,44	54.407.146.032,00	43,44	62,28	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5400	85.865.000.000,00	4344	44.759.488.961,00	1232	12.745.898.003,00	308	2.691.062.870,00	616	6.320.883.347,00					924	9.011.946.217,00	1.908,00	53.771.435.178,00	35,33	62,62	Subbag Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	1.370.000.000,00	48	507.258.411,00	12	150.252.000,00	3	23.096.800,00	6	60.884.820,00					9	83.981.620,00	21	591.240.031,00	35	43,16	Subbag Keuangan

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	127.000.000,00	4	41.213.555,00	1	12.841.150,00	0,25	0,00	1	2.782.400,00						1,25	3.257.268,00	3	44.470.823,00	60	35,02	Subbag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						43,44	46,93		
Predikat Kinerja																									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.531.627.500,00	85	411.766.644,00	85	372.281.842,00	0	0,00	75	0,00	0	0	0	0	0	75	0,00	29,18	411.766.644,00	29,18	26,88	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	331.357.500,00	2	116.200.000,00	1	68.990.842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	116.200.000,00	20	35,07	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	425	663.130.000,00	205	168.898.596,00	90	199.961.000,00	0	0,00	85	0,00	0	0	0	0	0	85	0,00	270	168.898.596,00	63,53	25,47	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75	537.140.000,00	102	126.668.048,00	5	103.330.000,00	0	0	1	0,00	0	0	0	0	0	1	0,00	3	126.668.048,00	4	23,58	Subbag Umum dan Kepegawaian

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

29,1
8

28,0
4

Predikat Kinerja

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.837.778.800,00	95,71	2.209.498.728,00	85	959.999.204,20	25,74	35.874.114,00	62	67.025.522,00	0	0	0	0	87,74	102.899.636,00	37,97	2.312.398.364,00	37,97	47,80	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	120.000.000,00	4	38.669.590,00	1	12.542.860,00	0,25	1.713.350,00	0,5	1.713.350,00					0,75	3.426.700,00	4,75	42.096.290,00	95,00	35,08	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	1.000.000.000,00	4	584.796.400,00	1	480.630.490,00	0,07	0,00	0,5	0,00					0,57	0,00	4,57	584.796.400,00	91,40	58,48	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	126.000.000,00	4	88.923.450,00	1	23.365.400,00	0,4	7.237.500,00	0,5	10.222.500,00					0,9	17.460.000,00	4,9	106.383.450,00	98,00	84,43	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	110.000.000,00	3	49.434.005,00	1	19.300.000,00	0,15	1.500.000,00	0,5	1.500.000,00					0,65	3.000.000,00	3,65	52.434.005,00	73,00	47,67	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas	5	80.000.000,00	3,8	35.765.000,00	1	29.034.000,00	0	0,00	0,5	0,00					0,5	0,00	4,3	35.765.000,00	86,00	44,71	Subbag Umum dan



		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	663.130.000,00	2	61.274.832,00	0	30.606.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	61.274.832,00	40	9,24	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					20	3,36		
Predikat Kinerja																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.122.976.279,18	85	3.120.980.487,00	85	1.041.902.021,00	23,75	191.653.464,00	50	449.878.694,00	0	0	0	0	73,75	641.532.158,00	158,75	3.762.512.645,00	158,75	91,26	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	23.684.020,64	2,9	5.669.120,00	1	4.460.000,00	0,25	0	0,5	0					0,75	0,00	3,65	5.669.120,00	73	23,94	Subbag Umum dan Kepegaw aian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5	2.762.315.901,17	2,97	2.047.405.764,00	1	722.990.135,00	0,25	166.745.226,00	0,5	331.672.917,00					0,75	498.418.143,00	3,72	2.545.823.907,00	74,4	92,16	Subbag Umum dan Kepegaw aian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	1.336.976.357,37	3	1.067.905.603,00	1	314.451.886,00	0,25	24.908.238,00	0,5	118.205.777,00					0,75	143.114.015,00	3,75	1.211.019.618,00	75	90,58	Subbag Umum dan Kepegaw aian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					74,13	68,89		
Predikat Kinerja																								

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	19.368.851.630,99	99	1.916.127.231,00	90	487.454.000,00	8,03	7.920.000,00	32,13	20.510.000,00	0	0	0	0	40,16	28.430.000,00	90	1.944.557.231,00	90	10,04	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	1.415.837.550,00	63	921.500.875,00	25	243.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	63	921.500.875,00	252	65,09	Subbag Umum dan Kepegaw aian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75	292.159.080,99	90	91.051.990,00	25	28.560.000,00	3	4.260.000,00	8	11.360.000,00	0	0	0	0	11	15.620.000,00	101	106.671.990,00	134,666667	36,51	Subbag Umum dan Kepegaw aian
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1	17.550.000,00	2,3	853.374.366,00	1	195.024.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,3	853.374.366,00	230	4,86	Subbag Umum dan Kepegaw aian
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	35	110.855,00	47	50.200,00	10	20.130,00	6	3.660,00	27	9.150,00	0	0	0	0	33	12.810,00	80	63.010,00	228,57	56,84	Subbag Umum dan Kepegaw aian

		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5	6.100.000.000,00	4	1.201.358.470,00	1	249.390.460,00	0,27	66.875.002,00	0,9	141.340.482,00					1,17	208.215.484,00	5,17	1.409.573.954,00	103,40	23,11	Subbid Pengadaan dan Pemberhentian	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	400.000.000,00	4	209.603.322,00	1	54.415.712,00	0,25	0	0,95	25.338.124,00					1,2	25.338.124,00	5,2	234.941.446,00	104,00	58,74	Subbid Pengadaan dan Pemberhentian	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi	1	3.050.000.000,00	2,4	1.064.299.818,00	1	88.754.520,00	0,25	0	0,45	21.754.800,00					0,7	21.754.800,00	3,1	1.086.054.618,00	310,00	35,61	Subbid Organisasi dan Profesi ASN	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5	1.625.000.000,00	4	609.707.019,00	1	175.677.628,00	0,25	0,00	0,3	0,00					0,55	0,00	4,55	609.707.019,00	91,00	37,52	Subbid Data dan Informasi	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								152,10	38,74
Predikat Kinerja																									
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi	95	6.269.999.575,00	85,69	4.296.118.689,00	95	587.302.068,80	15,21	50.996.610,00	30,83	84.541.250,00	0	0	0	0	46,04	135.537.860,00	110,33	4.431.656.549,00	116,14	70,68		

		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	4474	821.593.680,00	2703	136.896.167,00	500	30.279.200,00	0	0,00					0	0,00	2703	136.896.167,00	60,42	16,66	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan		
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5	5.775.000.000,00	4	547.390.934,00	1	178.521.400,00	0	0,00					0	0,00	4	547.390.934,00	80,00	9,48	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan		
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	5	8.953.142.543,00	4	2.081.281.586,00	1	601.184.400,00	0	0,00	0,5				0,5	0,00	4,5	2.081.281.586,00	90,00	23,25	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan		
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	5	3.050.000.000,00	4	372.553.969,00	1	187.043.250,00	0,18	27.279.951,00	0,39				0,57	66.508.243,00	4,57	439.062.212,00	91,40	14,40	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5	1.723.040.000,00	4	400.307.994,00	1	127.527.900,00	0,28	6.832.110,00	0,53				0,81	28.967.540,00	4,81	429.275.534,00	96,20	24,91	Subbid Pembinaan Jabatan Fungsional		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						83,60	17,74	
Predikat Kinerja																								

		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95	3.368.154.202,00	104,45	1.071.047.454,00	90	382.359.945,00	25,51	33.994.135,00	44,69	77.456.095,00	0	0	0	0	70,2	111.450.230,00	35,63	1.182.497.684,00	37,51	35,11	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	1.117.645.323,50	47	352.723.809,00	12	125.005.785,00	3	11.048.625,00	6	16.553.625,00					9	27.602.250,00	56	380.326.059,00	93,33	34,03	Subbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	4750	759.859.721,50	2938	231.157.768,00	500	100.735.460,00	0	11.578.610,00	150	33.994.770,00					150	45.573.380,00	3088	276.731.148,00	65,01	36,42	Subbid Penghargaan
			Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi									58,89						58,89	0,00	58,89	0,00			
			Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi									100						100	0,00	100	0,00			
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan	215	427.649.157,00	176	98.543.206,00	43	44.597.400,00	0	2.564.000,00	0	4.484.000,00					0	7.048.000,00	176	105.591.206,00	81,86	24,69	Subbid Disiplin ASN

2.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja menuntut kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic/berkala. Dalam sistem AKIP Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja renja triwulan II tahun 2025 berkenaan terhadap capaian sasaran strategis perangkat daerah.

Sampai dengan akhir triwulan II ini capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 49,13%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1 (Meningkatnya Kompetensi dan Iklim Kerja Aparatur)**, Sasaran 1 ini diwujudkan dengan tolok ukur 2 (dua) indikator, yaitu: (1) *Indeks Profesionalitas ASN*; dan (2) *Indeks Penerapan Sistem Merit ASN*. Sampai dengan akhir Triwulan II capaian kinerja dari sasaran ke satu ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d Triwulan II

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	67,50 Indeks	0,00 Indeks	0,00%
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	275 Indeks	0,00 Indeks	0,00%

Sumber: Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2025

Capaian kinerja pada indikator profesionalitas ASN dan penerapan sistem merit belum didapatkan. Hingga akhir triwulan II belum dilakukan pengukuran dan analisis data dikarenakan masih dalam tahapan survei

pengumpulan data. Hasil pengukuran akan didapatkan setelah dilakukan analisis data yang terkumpul. Pengumpulan data melalui survei ditargetkan selesai pada triwulan IV tahun 2025.

Dalam mewujudkan targetnya, indikator sasaran ini dicapai melalui Program Kepegawaian Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kegiatan Operasional Program Kepegawaian Daerah

NO	URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	323.304.832,00	188.433.406,00	58,28%
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	154.420.680,00	141.340.482,00	91,53%
	- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	26.476.124,00	25.338.124,00	95,70%
	- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	48.403.200,00	21.754.800,00	44,94%
	- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	94.004.828,00	0	0%
2.	Mutasi dan Promosi ASN	366.594.480,28,00	84.541.250,00	23,06%
	- Pengelolaan Mutasi ASN	70.449.378,00	25.512.975,00	36,21%
	- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	91.083.920,28	28.931.515,00	31,76%
	- Pengelolaan Promosi ASN	205.061.182,00	30.096.760,00	14,68%
3.	Pengembangan Kompetensi ASN	660.144.497,00	61.363.722,00	9,30%
	- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	14.152.900,00	0	0%
	- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	89.422.700,00	0	0%
	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	385.773.000,00	0	0%

NO	URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
	- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	98.928.758,50	39.228.292,00	39,65%
	- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	71.867.139,00	22.135.430,00	30,80%
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	213.200.024,00	77.456.095,00	36,33%
	- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	69.249.175,00	16.553.625,00	23,90%
	- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	57.210.649,00	33.994.770,00	59,42%
	- Pembinaan Disiplin ASN	23.278.800,00	4.484.000,00	19,26%
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	63.461.400,00	22.423.700,00	35,33%

Sumber: Dokumen Data LPPK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2025

b. **Sasaran 2 (Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang baik)**, Sasaran 2 ini diwujudkan dengan tolok ukur 2 (dua) indikator, yaitu: (1) *Predikat Nilai SAKIP*; dan (2) *Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian*. Sampai dengan akhir triwulan II, capaian kinerja dari sasaran ke dua ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Sasaran 2 s.d Triwulan I

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	BB	BB	100,00%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	85,30 Indeks	0,00	0,00%

Sumber: Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2025

Dalam mewujudkan targetnya, indikator sasaran ini dicapai melalui Program Kepegawaian Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Kegiatan Operasional Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.269.530,00	44.529.245,00	34,72%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.348.890,00	30.320.705,00	27,98%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.649.640,00	7.383.040,00	85,36%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.271.000,00	6.825.500,00	60,56%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.857.593.871,00	6.384.550.567,00	49,66%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.745.898.003,00	6.320.883.347,00	49,59%
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.438.600,00	60.884.820,00	56,15%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.257.268,00	2.782.400,00	85,42%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.235.920,00	0	0%
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72.395.920,00	0	0%
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.840.000,00	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.119.111,10	67.025.522,00	9,60%

NO	URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.717.144,00	1.713.350,00	22,20%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	457.522.990,00	0	0%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.019.240,00	10.222.500,00	53,75%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.720.000	1.500.000	19,43%
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	11.613.600,00	0	0%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.755.677,10	47.741.672,00	26,41%
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.770.460,00	5.848.000,00	42,47%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.204.000,00	0	0%
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.204.000,00	0	0%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.024.988.782,65	449.878.694,00	43,89%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	892.000,00	0	0%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	713.006.628,25,00	331.672.917,00	46,52%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.090.154,40	118.205.777,00	38,00%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.254.077,47	20.510.000,00	4,94%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	179.470.077,47	0	0%

NO	URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	BOBOT REALISASI
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.560.000,00	11.360.000,00	39,78%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.024.000,00	0	0%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	9.150.000,00	75,00%

Sumber: Dokumen Data LPPK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jambi Untuk mengukur kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, telah ditetapkan target kinerja yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yaitu merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Indikator Kinerja dalam mewujudkan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN
2.		Predikat SAKIP

	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
--	--	---------------------------------------

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2025

Dalam mewujudkan kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, *workshop*, sosialisasi dan seminar;
2. Meningkatkan pengelolaan pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian secara professional dengan mengedepankan prinsip-prinsip sistem merit;
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan memastikan alur dan SOP pelayanan berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terbuka, transparan dan akuntabel.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jambi

Isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Analisis perumusan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dijabarkan melalui analisis SWOT sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal
 - a. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dengan tingkat pendidikan rata-rata yang memadai;
 - Tersedianya alokasi dana dari APBD Provinsi melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada setiap tahun anggaran;
 - Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai payung hukum.
- b. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran, terutama yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
 - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (Pegawai Negeri Sipil) yang ada.

2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunities*)

- Adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten;
- Adanya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan kinerja pelayanan

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

- Adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh arus globalisasi informasi, yang dapat mempengaruhi kinerja PNS;
- Adanya pengaruh negatif dari kegiatan politik praktis yang dapat merugikan karir PNS.

3. Permasalahan Utama

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- Belum optimalnya sarana prasarana dan kapasitas SDM aparatur untuk menunjang pelaksanaan program kerja organisasi;
- Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program kerja/kegiatan di semua tingkatan, baik dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jambi;

- Masih terbatasnya porsi penganggaran untuk mendukung capaian target kinerja mewujudkan SDM Aparatur yang profesional menuju IP ASN Pemerintah Provinsi Jambi yang sama atau melebihi rata-rata nasional.

4. Rumusan Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang telah dikemukakan tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Jambi yang masih rendah;
- Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Pemerintah Provinsi Jambi;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian
- Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk mendukung Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rancangan perubahan rencana kerja tahun 2025 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 dalam aspek Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, yaitu dalam hal:

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian berbasis teknologi dan informasi, serta digitalisasi penataan arsip kepegawaian;
2. Peningkatan jasa layanan kantor untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepegawaian dan pelaksanaan tugas SDM aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan capaian target kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi, serta IKU.

Adapun rincian perubahan rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dituangkan dalam Tabel 3.1 Rekapitulasi Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di bawah ini:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi
Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025

REKAPITULASI
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

OP
D : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>Outcome / Output</i>)	Sebelum Perubahan		Evaluasi s.d Triwulan II				Usulan Perubahan Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Unit SKPD Penanggung Jawab Ket	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi i Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Target	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4) x 100	9 = (7/5) x 100	#	11	12	9	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	B	BB Indeks	16.035.630.320,2	BB	7.232.321.962,00	100,00	51,78	BB Indeks	15.668.827.109,22	(366.803.210,98)	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	B	86,00	0	86,00		100,00					
		Persentase tercapainya Nilai Sakip dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		100 %		93,00		93,00		100 %			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	234.396.100,00	72,22	49.335.321,00	72,22	57,18	100 %	128.269.530,00	(106.126.570,00)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6 Dokumen	188.920.980,00	4,00	42.583.321,00	66,67	59,80	6 Dokumen	108.348.890,00	(80.572.090,00)	Subbag Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3 Dokumen	19.347.120,00	1,00	3.897.000,00	100,00	71,81	1 Dokumen	8.649.640,00	(10.697.480,00)	Subbag Perencanaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8 Laporan	26.128.000,00	2,00	2.855.000,00	50,00	29,63	4 Laporan	11.271.000,00	(14.857.000,00)	Subbag Perencanaan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	12.908.991.153,00	66,67	6.154.462.952,00	66,67	52,11	100 %	13.265.755.688,00	356.764.535,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	#	1232 Orang/Bulan	12.745.898.003,00	570	6.094.981.574,00	50,00	52,05	1232 Orang/Bulan	13.154.059.820,00	408.161.817,00	Subbag Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	#	12 Dokumen	150.252.000,00	6,00	56.192.628,00	50,00	56,63	12 Dokumen	108.438.600,00	(41.813.400,00)	Subbag Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 Laporan	12.841.150,00	1,00	3.288.750,00	100,00	99,99	1 Laporan	3.257.268,00	(9.583.882,00)	Subbag Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 %	372.281.842,00	50,00	35.608.570,00	58,82	43,66	85 %	115.235.920,00	(257.045.922,00)		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1 Paket	68.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	0,00	(68.990.842,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	#	90 Orang	199.961.000,00	85,00	25.365.750,00	100,00	43,42	85 Orang	72.395.920,00	(127.565.080,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5 Orang	103.330.000,00	1,00	10.242.820,00	50,00	44,25	2 Orang	42.840.000,00	(60.490.000,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 %	959.999.204,20	53,08	444.208.812,00	62,44	75,45	85 %	698.119.111,10	(261.880.093,10)		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	12.542.860,00	0,50	1.204.427,00	50,00	24,09	1 Paket	7.717.144,00	(4.825.716,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	480.630.490,00	1,00	243.467.400,00	100,00	99,98	1 Paket	457.522.990,00	(23.107.500,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1 Paket	23.365.400,00	0,50	7.786.650,00	50,00	47,08	1 Paket	19.019.240,00	(4.346.160,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	1 Dokumen	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Dokumen	7.720.000,00	(11.580.000,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1 Laporan	29.034.000,00	0,50	1.445.000,00	50,00	39,53	1 Laporan	11.613.600,00	(17.420.400,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	#	1 Laporan	361.511.354,20	16,00	182.653.687,00	61,54	60,88	26 Laporan	180.755.677,10	(180.755.677,10)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	#	1500 Dokumen	33.615.100,00	900,00	7.651.648,00	60,00	38,26	1500 Dokumen	13.770.460,00	(19.844.640,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	-	0,00	0,00	0,00	0,00	90 %	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	0 Unit	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0 Paket	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Paket	0,00	0,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	1 Unit	30.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Unit	21.204.000,00	(9.402.000,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85 %	1.041.902.021,00	50,00	484.826.467,00	58,82	48,65	85 %	1.024.988.782,65	(16.913.238,35)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1 Laporan	4.460.000,00	0,50	0,00	50,00	0,00	1 Laporan	892.000,00	(3.568.000,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1 Laporan	722.990.135,00	0,50	329.280.278,00	50,00	47,81	1 Laporan	713.006.628,25	(9.983.506,75)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1 Laporan	314.451.886,00	0,50	155.546.189,00	50,00	50,64	1 Laporan	311.090.154,40	(3.361.731,60)	Subbag Umum dan Kepegawaian

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	487.454.000,00	32,13	63.879.840,00	37,80	15,89	85 %	415.254.077,47	(72.199.922,53)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	#	25 Unit	243.740.000,00	5,00	49.253.100,00	20,00	17,99	25 Unit	179.470.077,47	(64.269.922,53)	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	#	18 Unit	28.560.000,00	8,00	5.026.740,00	53,33	47,29	15 Unit	28.560.000,00	0	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1 Unit	195.024.000,00	0,00	-	0,00	0,00	1 Unit	195.024.000,00	0	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	#	35 Unit	20.130.000,00	16,00	9.600.000,00	55,17	54,27	29 Unit	12.200.000,00	(7.930.000,00)	Subbag Umum dan Kepegawaian
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	#	300 Indeks	2.662.456.483,80	0,00	746.437.803,00	0,00	39,33	300 Indeks	1.713.243.833,78	(949.212.650,02)	
		Indeks Profesionalitas ASN	#	80 Indeks		0,00		0,00		80 Indeks			
		Persentase tercapainya IPSM ASN & IP ASN		100 %		0,00		0,00		100 %			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		90 %	568.238.320,00	92,50	215.330.882,00	102,78	57,77	90 %	323.304.832,00	(244.933.488,00)	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1 Dokumen	249.390.460,00	0,90	109.438.162,00	90,00	75,40	1 Dokumen	154.420.680,00	(94.969.780,00)	Subbid Pengadaan dan Pemberhentian
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	1 Dokumen	54.415.712,00	1,00	22.130.400,00	100,00	100,00	1 Dokumen	26.476.124,00	(27.939.588,00)	Subbid Pengadaan dan Pemberhentian
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1	1 Lembaga	88.754.520,00	0,80	27.946.300,00	80,00	33,68	1 Lembaga	48.403.200,00	(40.351.320,00)	Subbid Organisasi dan Profesi ASN

Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	175.677.628,00	1,00	55.816.020,00	100,00	45,58	1 Laporan	94.004.828,00	(81.672.800,00)	Subbid Data dan Informasi	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95 %	587.302.068,80	51,67	158.083.057,00	54,39	28,48	95 %	516.594.480,28	(70.707.588,52)		
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	4 Dokumen	127.195.690,00	2,00	20.593.250,00	50,00	74,44	4 Dokumen	70.449.378,00	(56.746.312,00)	Subbid Mutasi
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	1 Laporan	167.035.778,80	0,55	24.567.944,00	55,00	55,34	1 Laporan	91.083.920,28	(75.951.858,52)	Subbid Kepangkatan
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1 Dokumen	293.070.600,00	0,50	112.921.863,00	50,00	23,38	1 Dokumen	355.061.182,00	61.990.582,00	Subbid Promosi
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	90 %	1.124.556.150,00	35,80	293.417.222,00	39,78	34,89	90 %	660.144.497,50	(464.411.652,50)		
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	#	500 Orang	30.279.200,00		15.434.000,00	0,00	59,76	500 Orang	14.152.900,00	(16.126.300,00)	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1 Dokumen	178.521.400,00			0,00	0,00	1 Dokumen	89.422.700,00	(89.098.700,00)	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	1	1 Dokumen	601.184.400,00	0,50	233.983.578,00	50,00	35,29	1 Dokumen	385.773.000,00	(215.411.400,00)	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional	1	1 Dokumen	187.043.250,00	0,54	30.183.644,00	54,00	35,98	1 Dokumen	98.928.758,50	(88.114.491,50)	Subbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	1 Dokumen	127.527.900,00	0,75	13.816.000,00	75,00	62,43	1 Dokumen	71.867.139,00	(55.660.761,00)	Subbid Pembinaan Jabatan Fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %	382.359.945,00	69,22	79.606.642,00	72,86	61,57	95 %	213.200.024,00	(169.159.921,00)		

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	#	12 Dokumen	125.005.785,00	6,00	18.272.110,00	50,00	35,92	12 Dokumen	69.249.175,00	(55.756.610,00)	Subbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	#	500 Orang	100.735.460,00	203	19.796.000,00	40,60	76,54	500 Orang	57.210.649,00	(43.524.811,00)	Subbid Penghargaan
		Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi											
		Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi											
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	#	43 Orang	44.597.400,00	50	11526800,00	116,28	83,34	43 Orang	23.278.800,00	(21.318.600,00)	Subbid Disiplin ASN
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	#	20 Laporan	112.021.300,00	14,00	30.011.732,00	70,00	77,49	20 Laporan	63.461.400,00	(48.559.900,00)	Subbid Disiplin ASN
J U M L A H					18.698.086.804,00		7.978.759.765,00				17.382.070.943,00	(1.316.015.861,00)	

Berdasarkan tabel 3.1 Rekapitulasi Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dicermati hal-hal sebagai berikut:

3.1.1. Program yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dari pagu sebesar Rp.16.035.630.320,20 menjadi Rp15.668.827.109,22;
2. Program Kepegawaian Daerah, dari pagu sebesar Rp2.662.456.483,80 menjadi Rp1.713.243.833,78.

3.1.2. Kegiatan yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu Rp. 234.396.100,00 menjadi Rp. 128.269.530,00;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari pagu Rp. 12.908.991.153,00 menjadi Rp. 13.265.755.688,00;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari pagu Rp. 372.281.842,00 menjadi Rp. 115.235.920,00;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari pagu Rp. 959.999.204,20 menjadi Rp. 698.119.111,10;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari pagu Rp. 30.606.000,00 menjadi Rp. 21.204.000,00;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari pagu Rp. 1.041.902.021,00 menjadi Rp 1.024.988.782,65;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari pagu Rp. 487.454.000,00 menjadi Rp. 415.254.077,47;
8. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dari pagu Rp. 568.238.320,00 menjadi Rp 323.304.832,00;

9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dari pagu Rp 587.302.068,80 menjadi Rp 516.594.480,28;
10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi, dari pagu Rp. 1.124.556.150,00 menjadi Rp. 660.144.497,50;
11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, dari pagu Rp. 382.359.945,00 menjadi Rp 213.200.024,00.

3.1.3. Sub Kegiatan yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari pagu Rp 188.920.980,00 menjadi Rp 108.348.890,00;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari pagu Rp 19.347.120,00 menjadi Rp 8.649.640,00;
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu Rp 26.128.000,00 menjadi Rp 11.271.000,00;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari pagu Rp 12.745.898.003,00 menjadi Rp 13.154.059.820,00;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dari pagu Rp 150.252.000,00 menjadi Rp 108.438.600,00;
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari pagu Rp 12.841.150,00 menjadi Rp 3.257.268,00;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dari pagu Rp. 68.990.842,00 menjadi Rp. 0;
8. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari pagu Rp 199.961.000,00 menjadi Rp 72.395.920,00;
9. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dari pagu Rp 103.330.000,00 menjadi Rp 42.840.000,00;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, dari pagu Rp 12.542.860,00 menjadi Rp 7.717.144,00;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan, dari

- pagu Rp 480.630.490,00 menjadi Rp 457.522.990,00;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari pagu Rp 23.365.400,00 menjadi Rp 19.019.240,00;
 13. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan, dari pagu Rp. 19.300.000,00 menjadi Rp. 7.720.000,00;
 14. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dari pagu Rp 239.04.000,00 menjadi Rp 11.613.600,00;
 15. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dari pagu Rp 361.511.354,20 menjadi Rp180.755.677,10;
 16. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dari pagu Rp33.615.100,00 menjadi Rp 13.770.460,00;
 17. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari pagu Rp. 30.606.000,00 menjadi Rp. 21.204.000,00;
 18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.460.000,00 menjadi Rp. 892.000,00
 19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari pagu Rp. 722.990.135,00 menjadi Rp. 713.006.628,25;
 20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari pagu Rp 314.451.886,00 menjadi Rp. 311.090.154,40;
 21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari pagu Rp 243.740.000,00 menjadi Rp 179.470.077,47;
 22. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari pagu Rp 20.130.000,00 menjadi 12.200.000,00;
 23. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dari pagu Rp 249.390.460,00 menjadi Rp 154.420.680,00;
 24. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dari pagu Rp 54.415.712,00 menjadi Rp 26.476.124,00;

25. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dari pagu Rp 88.754.520,00 menjadi Rp 48.403.200,00;
26. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi, dari pagu Rp175.677.628,00 menjadi Rp 94.004.828,00;
27. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, dari pagu Rp 127.195.690,00 menjadi Rp. 70.449.378,00;
28. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dari pagu Rp. 167.035.778,80 menjadi Rp 91.083.920,28;
29. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dari pagu Rp482.953.870,00 menjadi Rp799.999.870,00
30. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dari pagu Rp30.279.200,00 menjadi Rp14.152.900,00;
31. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi, dari pagu Rp178.521.400,00 menjadi Rp89.422.700,00;
32. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional, dari pagu Rp187.043.250,00 menjadi Rp98.928.758,50;
33. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, dari pagu Rp127.527.900,00 menjadi Rp71.867.139,00;
34. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, dari pagu Rp125.005.785,00 menjadi Rp 57.210.649,00;
35. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, dari pagu Rp100.735.460,00 menjadi Rp29.743.600,00;
36. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, dari pagu Rp44.597.400,00menjadi Rp23.278.800,00;
37. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dari pagu Rp 112.021.300,00 menjadi Rp 63.461.400,00.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini memuat penyesuaian-penyesuaian terhadap program kegiatan dan pendanaan sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja dan serapan anggaran di tahun 2025. Dokumen Rancangan Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BKD Provinsi Jambi di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan BKD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan rancangan Renja ini tetap berpedoman pada Renstra BKD Provinsi Jambi 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan
3. Rancangan Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Provinsi Jambi Tahun 2026.
4. Dalam penyusunan RKA P nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil *review* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA P dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Rancangan Renja Perubahan yang telah disusun tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat